

# KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DALAM NORMALISASI KERJASAMA PERTAHANAN AUSTRALIA INDONESIA.

Oleh : Beni Sukadis dan Afrimadona

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu - Jakarta Selatan 12450  
Telp. (021) 7656971 ext. 156

---

**Kata Kunci : Australia, Indonesia, Kerjasama, Pertahanan.**

*This article discusses Australian Foreign Policy regarding its attempt to recover its defense cooperation with Indonesia following the deterioration in the cooperation between the two countries in the post East Timor riots in 1999 leading to diplomatic tension between them. At the height of this tense relation, Australia and Indonesia cancelled their defense cooperation signed in 1995. As time goes by, Australia attempted to approach Indonesia to recover defense cooperation. The main objective of Australian foreign and defense policies is to maintain its security and the security of countries in the Asia Pacific. This research analyses factors influencing Australia to approach Indonesia especially in the light of its national interests and regional and global dynamic. The result of the research demonstrates that the main factor driving the two countries into cooperation is the mutual interest in protecting their national and regional security from immanent non-traditional threats.*

---

## I. Pengantar

Hubungan Australia Indonesia telah dimulai sejak perang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pemerintahan Australia terlibat dalam Komisi tiga negara yang melakukan mediasi antara Indonesia dan Belanda. Posisi Australia saat itu lebih pro Indonesia, karena partai yang berkuasa adalah Partai Buruh yang memiliki konstituen dari kelompok buruh yang bersimpati pada kemerdekaan Indonesia.

Hubungan kedua negara mengalami pasang surut, namun pada zaman pemerintahan Soeharto hubungan makin membaik dan bahkan dianggap era terbaik dalam hubungan bilateral kedua negara. Ini ditandai dengan hangat hubungan personal antara PM Keating dan Presiden Soeharto. Sebagai puncaknya tahun 1995, kedua negara menandatangani perjanjian keamanan bersama atau lebih dikenal sebagai Agreement on Maintaining Security.

Sebelum penandatanganan AMS ini, kerjasama kedua negara di bidang militer sebenarnya sudah sangat baik. Tetapi tahun 1990an ini dianggap sebagai puncak hubungan kerjasama militer kedua negara. Seiring dengan waktu terutama ketika Soeharto turun dari kekuasaan atas desakan rakyat diganti dengan Habibie sebagai Presiden ketiga. Sementara itu, PM Australia John Howard berhasil mendorong Habibie untuk menerima penyelenggaraan jajak pendapat yang diadakan PBB. Hasil jajak pendapat ini berujung dengan kerusuhan di Timor Leste. Akibat besarnya tekanan dari dalam negeri – pasca kerusuhan tersebut - membuat Australia harus membatalkan beberapa latihan militer dengan Indonesia. Sejak itu hubungan kerjasama pertahanan mengalami penurunan yang drastis, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Dengan latar belakang diatas, maka tulisan ini membahas upaya Australia melakukan normalisasi kerjasama pertahanan dengan Indonesia.

## II. Kepentingan Australia terhadap Indonesia

Bulan Oktober 2002, ledakan bom terjadi di Pulau Bali. Korban jiwa terbesar akibat ledakan bom ini berasal dari negara Australia. Pemerintah Australia<sup>1</sup> menyatakan insiden ini mengganggu kepentingannya terutama keselamatan warganya yang berkunjung ke Bali. Menurut statistik kunjungan wisatawan asing di Bali, diketahui bahwa warga negara Australia termasuk wisatawan terbesar kedua setelah Jepang.<sup>2</sup>

Sehingga pemerintah Australia menganggap keterlibatannya dalam penyelidikan bom Bali I sangat penting. Pemerintah Australia khawatir atas keselamatan warga Australia yang bekerja di Indonesia dan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi sejumlah perusahaan Australia di Indonesia<sup>3</sup>. Artinya pemerintah Australia memiliki kepentingan nasional untuk menyelamatkan warga negara dan ekonomi nasionalnya<sup>4</sup>. Setelah peledakan bom di Bali tahun 2002, ternyata peledakan bom masih berlangsung di Indonesia, yaitu tahun 2003 di Hotel Marriot Jakarta, tahun 2004 di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dan tahun 2005 terjadi peledakan bom Bali kedua. Dapat dinyatakan bahwa peledakan bom Bali I tahun 2002 merupakan serangan teroris terbesar kedua setelah serangan ke gedung WTC, New York, AS tahun 2001.

Australia sangat berkepentingan untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia, karena ada berbagai kepentingan Australia di Indonesia. Salah satu kepentingannya yakni harus melindungi warga negaranya dari serangan teroris dan menjaga aset perusahaan Australia yang ada di Indonesia. Kerjasama tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tapi ada beberapa kasus yang membutuhkan keterlibatan militer Australia baik dalam situasi darurat (bantuan *airlift* pasca Bom Bali I) ataupun dalam menjaga wilayah perbatasan kedua negara, seperti jalur laut di Laut Timor dan Arafura.

Letak Australia dalam geostrategi dan geopolitik akan menentukan bentuk kerjasama tersebut. Peningkatan kerjasama pertahanan merupakan bagian dari upaya pembangunan saling percaya (*confidence building measure*) diantara kedua negara. Seperti diketahui hubungan antara kedua negara mengalami pasang surut. Hubungan kedua negara sempat terganggu di zaman Presiden Soekarno yang melakukan kampanye konfrontasi terhadap Malaysia. Saat itu Australia bersama Inggris membantu Malaysia dengan mengirimkan pasukan ke Kalimantan.

Kemudian hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia membaik pada zaman Presiden Soeharto terutama pada tahun 1980-an. Saat itu terjadi pertukaran kunjungan dari petinggi militer kedua negara, antara lain kunjungan Panglima ABRI (sekarang TNI) Jenderal Try Sutrisno ke Australia tahun 1989. Kemudian tahun 1990, Panglima *Australian Defense Forces* (ADF) Peter Gration untuk kedua kalinya berkunjung ke Indonesia<sup>5</sup>.

Tahun 1990, Panglima ADF Jenderal Peter Gration menyatakan bahwa kedua negara telah sepakat mengadakan forum reguler untuk saling bertukar pikiran dalam bidang pertahanan terutama bagaimana situasi strategis regional didiskusikan secara terbuka antara pejabat militer kedua negara<sup>6</sup>. Forum ini disebut *Bilateral Defense Dialogue* (BDD). Hal ini menunjukkan kedua negara saling bergantung satu sama lain karena faktor geografisnya dan ada kesamaan kepentingan.

Tahun 1994, kedua negara diketahui memiliki kerjasama pertahanan yang lebih sering dibandingkan Indonesia dengan negara lain<sup>7</sup>. Kedua negara telah memahami kerjasama yang erat

1 Lihat Laporan Buku Putih Bom Bali, Farouk Muhammad dan H. Sulistyono (eds), Peristiwa dan Pengungkapan, Penerbit Pencil 324, Jakarta, 2006.

2 Farouk Muhammad dan Hermawan Sulistyono (eds), Buku putih Bom Bali: Peristiwa dan Pengungkapan, Penerbit Pencil 324, Jakarta, 2006, halaman. 15, yang menjelaskan tahun 2001 tentang data pengunjung wisata di Bali yakni warga Australia (238.857) merupakan wisatawan terbesar kedua setelah Jepang.

3 Allan Gynggel and Michael Wesley (eds), Making Australian Foreign Policy, 2007, Cambridge University Press, halaman 180.

4 Australian Foreign Affairs White Paper, Advancing National Interest, Commonwealth of Australia Canberra, 2003, hal. xix

5 Desmond Ball, "Indonesia and Australia: Strange Neighbour or Partners in Regional Resilience", dalam Hadi Susastro and Tim McDonald (ed), Australia-Indonesia Relations, CSIS, Jakarta; 1994. Hal 108.

6 Ibid, hal. 110.

7 Ibid, Hal. 107-108.

merupakan keniscayaan karena ada kesamaan kepentingan. Australia berkepentingan untuk mengamankan wilayahnya dari ancaman eksternal berupa ancaman militer, namun dalam perkembangannya ancaman non militer makin meningkat. Australia tentunya sadar ancaman non-militer justru memiliki potensi untuk mengancam kepentingan nasionalnya yaitu keamanan dan kesejahteraan. Sedangkan kepentingan Indonesia adalah pengamanan wilayah maritim dari ancaman dan gangguan berupa penyelundupan senjata dan manusia. Kepentingan Indonesia adalah menjaga kedaulatan nasional dan integritas nasional.

Masih terkait dengan ancaman non militer, kepentingan Australia menurut Buku Putih Pertahanan Australia 2000 yaitu, "*Australia faces many security concerns other than those involving military force. These include the potential for non-military threats such as cyber attack, organized crime and terrorism. They also include concerns over illegal immigrant, the drug trade, illegal fishing, piracy and quarantine infringements.*"<sup>9</sup> Sedangkan, dalam buku Putih Indonesia tahun 2003, dikatakan serangan agresi asing terhadap Indonesia sangat minim dalam kurun waktu 15 tahun ke depan. Ini membuktikan bahwa kedua negara memiliki kesamaan kepentingan.

Posisi Indonesia dalam sejumlah dokumen strategis milik Australia dinyatakan memiliki arti strategis bagi Australia, karena integritas Indonesia merupakan bagian dari kepentingan nasional Australia<sup>10</sup>. Sehingga pemerintah Australia berkomitmen untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan Indonesia<sup>11</sup>.

Hanya saja pasca referendum Timor Timur tahun 1999, hubungan kedua negara memburuk. Hal ini ditandai dengan Indonesia membatalkan perjanjian *Agreement on Maintaining Security (AMS)* yang ditandatangani Australia dan Indonesia tahun 1996. Pembatalan perjanjian AMS oleh pemerintah Indonesia merupakan reaksi atas keterlibatan Australia sebagai pimpinan INTERFET di Timor Leste<sup>12</sup>, Sebagai konsekuensinya sejumlah kerjasama pertahanan antara kedua negara dihentikan oleh Australia<sup>13</sup>. Memang tidak semua program dihentikan, bentuk kerjasama dihentikan adalah latihan bersama dan kunjungan pejabat tinggi. Kerjasama pertahanan kedua negara tetap berlanjut, tapi intensitas kerjasamanya berada pada titik yang rendah. Ini bisa dilihat dari jumlah anggaran yang dipakai dalam kerjasama pertahanan kedua negara selama tahun 2000-2001 yang hanya A\$ 3,3 juta. Sedangkan tahun 2004-05, anggaran kerjasama pertahanan kedua negara yang dihabiskan Australia meningkat sebesar A\$ 6 juta<sup>14</sup>.

Sejak 2001, ada upaya untuk memperbaiki hubungan kerjasama pertahanan kedua negara. Hal ini diawali dalam model kerja sama bilateral dalam bentuk forum dialog lewat saling menginformasikan isu-isu keamanan yang dapat ditangani bersama, termasuk peningkatan kapabilitas pertahanan kedua negara<sup>15</sup>. Forum ini berbentuk dialog pertahanan yang sebelumnya pernah berjalan sejak tahun 1990-an, tapi berhenti akibat peristiwa kerusuhan Timor Timur tahun 1999.

Dalam konteks itu, kerjasama pertahanan akan dikembangkan sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan rasa saling percaya di antara bangsa-bangsa dikawasan. Pada lingkup regional, kerjasama pertahanan melalui dialog strategis diarahkan bagi terwujudnya kawasan regional yang stabil melalui upaya bersama antar negara di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama pertahanan yang dilakukan Australia dalam lingkup regional adalah dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara,

8 Australian Foreign Affairs White Paper, *Advancing National Interest*, Australian Government, Canberra, 2003, hal X.

9 Australian Defense White Paper 2000, Australian Government, Canberra, 2000. Hal. 12

10 Defense Update 2003. Australian Department of Defense, Canberra, 2003. Hal. 19.

11 Lihat Australian Defense White paper 2000.

12 Pidato Ikrar Nusa Bhakti, "Merajut Kerjasama Keamanan Australia-Indonesia", dalam pengukuhan gelar Profesor riset LIPI, 2006. Hal. 7.

13 Australia Defense White Paper, *Defence 2000: Our future defense force*, Commonwealth of Australia, Canberra, 2000. Hal 42. Lihat artikel Pip Hinman, *Australia quietly resume military aid to Indonesia*, pada <http://etan.org/et2000c/august/1-5/02aust.htm> diakses pada 14 Mei 2011.

14 Allan Gyngell, *Australia-Indonesia*, dalam Brendan Taylor (eds), *Australia as an Asia Pacific Regional Power: Friendship in Flux*. Sydney; Routledge, 2007, hal. 107.

15 Lihat dokumen Kemhan Sekilas Hasil Dialog Strategis Pertahanan (IASD).

termasuk negara-negara yang berdekatan secara langsung yaitu Papua Nugini dan Indonesia<sup>16</sup>.

Dari perspektif Indonesia pada tingkat nasional, regional dan internasional, selain isu keamanan konvensional, terdapat isu atau masalah keamanan nontradisional seperti ancaman teroris, konflik komunal, penyelundupan kayu, penyelundupan komoditas /barang, penyelundupan manusia, keamanan maritim dan lain-lain<sup>17</sup>. Letak Indonesia yang berada diantara dua samudra dan kapabilitas Indonesia dalam mengawal wilayah maritimnya sangat lemah membuat Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan keamanannya.

Oleh karena itu, Australia memiliki kepentingan bahwa stabilitas negara-negara itu menjadi prioritas perhatiannya dan begitupun sebaliknya<sup>18</sup>. Australia dan Indonesia memiliki banyak kepentingan bersama antara lain bagaimana menghadapi terorisme, penyelundupan manusia dan keamanan maritim, serta penanggulangan bencana. Isu-isu ini termasuk dalam fokus perhatian, karena Australia merupakan negara tujuan dari para pengungsi dan imigran gelap. Australia adalah negara maju yang dianggap dapat menjadi negara tujuan (*destination*) dimana para imigran dapat menghindar dari persoalan konflik dan ekonomi di negara asalnya, serta berharap atas kehidupan baru di negara tujuan.

Fakta menunjukkan bahwa sejak beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Australia sangat *concern* pada kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi pengungsi yang melintas perairan Indonesia. Indonesia sebagai negara transit menuju ke Australia, terkesan sangat gampang dimasuki oleh kapal-kapal yang mengangkut pengungsi dan imigran gelap. Hal ini masuk akal karena kemampuan TNI dan Polri untuk menjaga perbatasan laut sangat minimal. Ini disebabkan armada kapal patroli TNI AL dan Polri tidak memungkinkan untuk menjaga secara keseluruhan wilayah laut Indonesia<sup>19</sup>. Disinilah Australia berpeluang membantu Indonesia dalam kerangka kerjasama bilateral.

Oleh karena itu, melihat kerjasama pertahanan yang telah berlangsung antara kedua negara sebelum pembatalan AMS oleh Indonesia, maka peluang bekerjasama kembali tetap ada<sup>20</sup>. Berbagai upaya pemulihan dalam Bentuk kerjasama dimediasi lewat dialog dan forum sebagai langkah awal untuk saling meyakinkan dan saling percaya. Kerjasama yang pernah terjalin menjadi pintu masuk bagi kerjasama yang lebih intensif.

### III. Upaya Australia dalam Normalisasi hubungan

Setelah krisis di Timor timur tahun 1999, hubungan Indonesia - Australia berupaya diperbaiki. Tahun 2000, Menteri Pertahanan Indonesia Juwono Sudarsono mengatakan satu delegasi pemerintah Australia sudah menawarkan pelatihan bagi personel TNI. Upaya dibukanya kembali kerjasama militer ini diumumkan Juwono Sudarsono dalam suatu resepsi kedatangan Menhan Bayangan dari Partai Buruh Australia Steve Martin yang ditemani oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia John McCarthy<sup>21</sup>. Sekretaris Martin menyatakan sebenarnya kerjasama pelatihan tidak pernah berhenti, walaupun perjanjian kerjasama militer dibatalkan kedua negara.

Dalam perkembangan lain ada upaya perbaikan hubungan pertahanan dengan melakukan dialog bilateral. Pertemuan informal yang dinamakan Indonesia Australia Defense Strategic Dialogue

16 Defence 2000: Our future defense force, Commonwealth of Australia; Canberra, 2000. Hal 41-45.

17 Buku Putih Pertahanan Negara, 2003. Jakarta; Dephan, 2003.

18 Buku Putih Luar Negeri dan Perdagangan, Advancing National Interest, 2003, Commonwealth of Australia; Canberra, 2003. h.al. xvii dan 92-97. Dan juga Defence 2000: Our future Defense Force, hal. 30-31.

19 Shiskha Prabawaningtyas, Diplomasi Bertetangga Baik dan Penegakan Hukum dalam Manajemen Perbatasan Indonesia, dalam B. Sukadis (ed), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2009*, Lesperssi, Jakarta, 2009.

20 Lihat artikel Pip Hinman, Op. Cit.

21 Australia Quietly Resume Military Aid to Indonesia, by Pip Hinman, Green left Weekly, Sydney; 2 Agustus 2000. Diakses dari <http://etan.org/et2000c/august/1-5/02aust.htm>

(IADSD) I diadakan di Bali, September 2001<sup>22</sup>. Dalam pertemuan ini kedua pihak sepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan. Ada beberapa kesimpulan dalam pertemuan ini yaitu; sejumlah isu regional dan dunia menjadi perhatian kedua negara sehingga bisa mengganggu kepentingan nasional kedua negara. Beberapa isu tersebut yaitu imigran gelap, penyelundupan senjata dan obat terlarang, dan kegiatan kriminal antar negara merupakan ancaman keamanan saat ini, serta perlu ditangani secara khusus pula<sup>23</sup>. Kemudian, persoalan memburuknya hubungan kedua negara banyak dipengaruhi pers kedua negara; perlu ada pengurangan perbedaan persepsi seminimal mungkin<sup>24</sup>.

Menarik dalam pertemuan itu masih ada sejumlah persoalan yang mencuat dalam kerjasama pertahanan kedua negara, yakni soal belum terlaksananya pertemuan antara angkatan darat kedua negara. Padahal, pertemuan *navy to navy talk* dan *airman to airman talk* akan dimulai. Yang kedua adalah, adanya penolakan dari pihak Australia terhadap personel yang berasal dari Kopassus untuk mengikuti pendidikan di Australia<sup>25</sup>. Tapi, kedua negara sepakat bahwa upaya membangun kepercayaan (CBM) adalah penting untuk mencegah timbulnya saling curiga diantara kedua pihak.

Seperti diketahui tragedi bom Bali I tahun 2002 mengakibatkan kerugian bagi kedua negara. Tak lama setelah itu PM John Howard berjanji akan memberikan bantuan pada Indonesia dalam skema kontra terorisme<sup>26</sup>. Jumlah bantuan yang dijanjikan sebesar 10 juta dolar Australia dalam jangka waktu empat tahun, dimana 30 persen dialokasikan untuk kegiatan kontra terorisme Polri. Tragedi bom ini menjadi titik awal dari kegiatan bilateral bidang kontra terorisme di semua lini birokrasi termasuk diantaranya kerjasama dengan militer Indonesia. Tragedi bom Bali merupakan *blessing in disguise* bagi kerjasama kedua negara.

Dalam dokumen resmi tahunan Defense Update 2003, Departemen Pertahanan Australia telah mempertimbangkan untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia soal kerjasama dengan militer Indonesia dalam bidang pembebasan sandera (*hostage recovery*) and anti pembajakan (*counter-hijacking*)<sup>27</sup>. Hal ini dijelaskan oleh Ms. Jeniffer Rawson, Asisten Sekretaris I, bidang Asia Selatan dan Asia Tenggara, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), didepan Komite Bersama Hubungan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan Parlemen Australia, pada 1 Mei 2003<sup>28</sup>. Dia menjelaskan pelibatan Kopassus dalam latihan bersama dengan Australia terakhir kali terjadi pada tahun 1997 dan terbuka peluang untuk mengadakan latihan bersama lagi. Dia menjelaskan dalam situasi adanya ancaman teroris terhadap keselamatan warga negara Australia, maka kerjasama kedua negara dalam latihan kontra terorisme merupakan hal yang patut didorong<sup>29</sup>. Artinya sejak tahun 2003

16 Defence 2000: Our future defense force, Commonwealth of Australia; Canberra, 2000. Hal 41-45.

17 Buku Putih Pertahanan Negara, 2003. Jakarta; Dephan, 2003.

18 Buku Putih Luar Negeri dan Perdagangan, Advancing National Interest, 2003, Commonwealth of Australia; Canberra, 2003. h al. xvii dan 92-97. Dan juga Defense 2000: Our future Defense Force, hal. 30-31.

19 Shiskha Prabawaningtyas, Diplomasi Bertanggung Jawab dan Penegakan Hukum dalam Manajemen Perbatasan Indonesia, dalam B. Sukadis (ed), Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2009, Lesperssi, Jakarta, 2009.

20 Lihat artikel Pip Hinman, Op. Cit.

21 Australia Quietly Resume Military Aid to Indonesia, by Pip Hinman, Green left Weekly, Sydney; 2 Agustus 2000. Diakses dari <http://etan.org/et2000c/august/1-5/02aust.htm>

22 Jamie MacKie, Australia Indonesia, Op.cit. Hal. 33. Dalam tulisan McKie ini ada pernyataan dari Menhan Australia Robert Hill bahwa Australia perlu memulai kembali hubungan pertahanan dengan militer Indonesia. Argumen Hill saat itu yakni TNI merupakan aparat yang bisa menjaga stabilitas di Indonesia. Lihat pula hasil wawancara dengan Richard Brabin-Smith, saat dia menjabat Wakil Direktur Bidang Kebijakan Strategis Dephan Australia, yang memiliki inisiatif untuk mendorong dibukanya kembali kerjasama pertahanan dengan Indonesia.

23 Laporan Kemhan, Sekilas Hasil-hasil Pertemuan Informal Indonesia Australia (IADSD). Tahun 2009. Hal. 1.

24 Ibid. Hal. 1.

25 Ibid. Hal. 1.

26 Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade: On Australia relations with Indonesia, Op.cit. Hal. 6. Lihat juga Allan Gyngell, Op.cit. Hal. 108.

27 Defence Update 2003, CoA. Hal. 19-20. Dan lihat juga Joint Standing Committee Hearing on Foreign Affairs, Defense and Trade Subcommittee on Foreign Affairs: On Australia and Indonesia relations (1 May 2003); Commonwealth of Australia; Canberra, 2003. Hal. 21. Diakses di [www.aph.gov.au/hansard](http://www.aph.gov.au/hansard). pada 4 mei 2011.

28 Ibid. Hal. 21

29 Ibid. Hal.21.

secara konkret ada upaya dari pemerintah Australia khususnya Departemen Pertahanan (DoD) Australia untuk memulai inisiatif pembicaraan latihan bersama dibidang kontra terorisme dengan pihak Indonesia.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Shane Carmody, Wakil Sekretaris Direktorat Kebijakan Strategis, Departemen Pertahanan Australia pada Juni 2003. Carmody menyatakan kemungkinan dimulai lagi kerjasama dengan pasukan Kopassus dibidang pembebasan sandera dan penanganan pembajakan. Kopassus dianggap sebagai unit militer yang paling mampu untuk melakukan operasi kontra terorisme di Indonesia<sup>30</sup>. Penegasan ini tentunya didasari kepentingan dari Australia untuk mengamankan warga negaranya dari ancaman serangan teroris yang saat itu menjadi ancaman utama<sup>31</sup>.

Pada bulan Juni 2004, personel TNI diundang ke Australia untuk menghadiri konferensi Regional Pasukan Khusus dalam menghadapi Terorisme<sup>32</sup>. Undanguan Australia kepada TNI dalam konferensi ini menandakan keseriusan Australia dalam mengatasi ancaman terorisme di kawasan Asia Pasifik, serta menunjukkan perbaikan hubungan antara kedua institusi militer.

Beberapa penjelasan diatas menunjukkan Australia berupaya melakukan pendekatan pada Indonesia dalam kerjasama pertahanan, khususnya dengan Kopassus. Kemudian dalam pertemuan IADSD yang kedua di Jogjakarta, 2004, Australia kembali mengutarakan keinginan agar Kopassus terlibat dalam latihan bersama di Canberra<sup>33</sup>. Pihak Indonesia merespon baik tawaran Australia ini, namun Indonesia masih perlu menunggu komitmen pimpinan politik kedua belah pihak sebagai landasan kerjasama tersebut<sup>34</sup>.

Sementara itu, Indonesia tetap terlibat dalam kerangka kerjasama pertahanan multilateral yang melibatkan berbagai negara di kawasan Asia Pasifik seperti India, Singapura, PNG, Vietnam, dan lainnya, walaupun hanya sebagai pengamat. Latihan militer Kakadu 2003, yang merupakan latihan regional bersama Australia dan Selandia Baru dengan sejumlah negara di Asia Pasifik. Latihan Kakadu adalah latihan yang melibatkan angkatan laut dan angkatan udara dalam mengatasi ancaman di laut<sup>35</sup>.

Akhir tahun 2004, wilayah propinsi Aceh mengalami gempa bumi dan terjangan tsunami yang mengakibatkan 100 ribu orang tewas. Saat itu Indonesia yang memiliki kekurangan dalam alutsista membutuhkan bantuan logistik dan sarana angkutan udara dari negara asing terutama dalam menyalurkan bantuan logistik dan obat-obatan serta tenaga medis. Australia adalah salah satu negara pertama yang mengirimkan bantuan kemanusiaan yang melibatkan ribuan personel ADF. Pasca bencana ini makin banyak kunjungan dari pejabat militer Australia ke Aceh dan ke Jakarta<sup>36</sup>. Hal ini bisa dianggap ini salah satu momen penting dalam hubungan pertahanan kedua negara yang mengarah pada peningkatan kerjasama.<sup>37</sup>

Pada tahun 2005, Departemen Pertahanan Australia menyampaikan pandangan bahwa secara resmi mereka ingin memulai kembali hubungan dengan Kopassus dalam arti perlu diadakan latihan bersama dalam bidang anti terror.<sup>38</sup> Yang cukup penting dilihat pula adalah kunjungan dari Komandan Operasi Khusus Australia ke Jakarta yang melakukan dialog dengan mitranya dalam upaya

30 Joint Committee on Defense, Foreign Affairs and Trade: on Australian relations with Indonesia, (Hearing 23 Juni 2003). Commonwealth of Australia; Canberra, 2003. Hal. 29.

31 Australian National Security: A Defense Update 2003, Canberra; CoA. 2003. Hal. 20. Lihat pula Buku Putih Luar Negeri dan Perdagangan 2003 dan Buku Putih Kontra Terorisme 2004. Kedua buku putih ini menyebutkan serangan teroris sebagai ancaman utama bagi Australia.

32 Defense Annual Report 2003-04, Commonwealth of Australia, Canberra; 2004. Hal. 174.

33 Laporan Kemhan, Sekilas hasil Dialog informal Indonesia Australia. Jakarta; Kemhan, 2009. Hal. 4.

34 Ibid, Hal. 4.

35 Defense Annual Report 2003-2004, Commonwealth of Australia, 2003. Hal. 175.

36 Annual Defense Report 2004-2005, Canberra; Commonwealth of Australia. Hal. 216. Disini disebutkan Menhan dan Panglima ADF Australia berkunjung ke Jakarta dalam rangka melihat operasi kemanusiaan dan juga peningkatan kerjasama kedua negara.

37 Sekilas Hasil Dialog informal Pertahanan, op.cit., Hal 13.

38 Hasil wawancara dengan narasumber bekas penasehat di kantor atase pertahanan Australia di Jakarta, peremail tgl. April 2011 hal. 1.

membicarakan rencana pelatihan kontra terorisme.<sup>39</sup> Pada tahun yang sama, untuk pertama kalinya latihan bersama dalam pengawasan udara dan laut yaitu Albatross Ausindo antara kedua negara kembali digelar di sekitar laut Timor, pasca pembatalan AMS tahun 1999.<sup>40</sup> Latihan gabungan bersama ini secara simbolis merupakan normalisasi kerjasama pertahanan antara kedua negara.

Periode 2004-2005, terjadi kunjungan enam kapal TNI AL ke Australia dan sebaliknya kapal perang Royal Australian Navy (RAN) mengunjungi Indonesia. Selain itu, ada sejumlah pelatihan bagi perwira senior, kursus singkat, maupun sekolah staf dan pimpinan yang diadakan di Australia. Salah satu pelatihan yang diberikan Australia adalah analisa informasi dibawah kerangka MoU tentang anti terorisme internasional. Pendidikan non-tempur diberikan di bidang pengetahuan umum dan bahasa Inggris.<sup>41</sup> Kerjasama antara kedua negara dalam kurun 2004-2005 dalam bentuk seminar dan kursus yaitu bidang manajemen pertahanan, operasi perdamaian, keamanan maritim, hukum militer dan keselamatan udara.<sup>42</sup> Sedangkan kerjasama latihan lebih banyak pada aspek pendidikan non-tempur yaitu pelatihan bahasa Inggris dan sekolah tingkat strata dua (master degree).

Pada bulan Februari 2006, pasukan khusus kedua negara, Kopassus dan SAS, melakukan latihan bersama untuk pertama kalinya sejak 1997. Latihan bernama *Exercise Dawn Kookabura* merupakan pelatihan operasi khusus untuk membebaskan sandera dan anti teror.<sup>43</sup> Setelah beberapa tahun diupayakan, akhirnya latihan bersama dibidang kontra terorisme bisa terwujud. Menariknya ini tidak diketahui banyak di Indonesia, sementara reputasi Kopassus pada masa lalu tidak cukup baik. Latihan dengan Kopassus menjadi suatu hal yang sangat kontroversial di Australia. Karena tiga tahun sebelum normalisasi kerjasama dengan Kopassus, sejumlah intelektual dan akademisi Australia menentang upaya normalisasi hubungan dengan Kopassus.<sup>44</sup> Keinginan pihak Departemen Pertahanan Australia dalam kerjasama dengan Kopassus ini tentunya terkait dengan isu terorisme seperti dijelaskan diatas.

Ditingkat lebih lanjut, kerjasama diantara kedua negara telah sampai pada tahap yang sangat baik. Bulan November 2006, menteri Luar negeri kedua negara menandatangani perjanjian Framework of Security Cooperation (FSC) atau di Indonesia disebut sebagai Perjanjian Lombok. Perjanjian Lombok merupakan kesepakatan kerjasama di bidang keamanan. Inti perjanjian Lombok ini merupakan perjanjian untuk tidak boleh saling bermusuhan dan peningkatan kerjasama yang lebih komprehensif.

Dalam pasal 2 dalam Perjanjian Lombok dinyatakan bahwa kedua negara agar menahan diri untuk tidak menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap pihak lain. Perjanjian ini juga menekankan untuk saling menghormati integritas teritorial, kesatuan dan kemerdekaan masing-masing negara.<sup>45</sup> Menurut berbagai analisa, perjanjian ini sangat penting bagi Indonesia karena memasukkan klausul yang menolak intervensi dari negara Australia terkait dengan isu separatisme. Dan ini dianggap menjadi kemenangan Indonesia dalam diplomasi bilateral. Australia juga menganggap perjanjian ini bagian yang tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya.

Perjanjian ini lebih komprehensif dari aspek isi, karena memasukan berbagai aspek kerjasama yaitu penegakan hukum, kontraterorisme, pertahanan, intelijen, keamanan maritim, keselamatan penerbangan dan lain-lain.<sup>46</sup> Artinya dibanding perjanjian AMS, perjanjian ini berupaya mencakup

39 Ibid, Hal. 219.

40 Annual Defense Report 2004-2005, Commonwealth of Australia, Canberra; 2005. Hal. 219.

41 Ibid, Hal 219.

42 Ibid, Hal 219.

43 Annual Defense Report 2005-06, Canberra; Commonwealth of Australia, 2006. Hal. 143.

44 Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defense and Trade, 1 Mei 2003, Op.cit. Hal 47-48. Disini Prof. Jamie McKie dan Prof. Harold Crouch memberikan kesaksian bahwa pemulihan kerjasama militer dengan Kopassus merupakan opsi yang buruk bagi reformasi TNI. Tapi disisi lain, Harold Crouch menyatakan tetap harus ada dialog dengan TNI, dan menurutnya TNI dapat diberikan kesempatan untuk ikut dalam sekolah staf dan pimpinan bagi perwiranya di Australia sebagai bagian dari dialog itu.

45 Allan Gyngell, Op.cit. hal 109.

46 Ibid. Hal. 110.

berbagai isu dan tematik. Secara normatif ini merupakan kemajuan besar dari hubungan kedua negara dan menandakan ada komitmen yang cukup serius dari kedua negara untuk memperbaiki hubungan bilateral yang sempat menurun di masa lalu. Dengan demikian kedua negara secara implisit mengakui bahwa mereka tidak bisa bekerja secara sendirian menghadapi berbagai tantangan dan ancaman saat ini.

Selain itu perjanjian keamanan 2006 ini membuka peluang bagi institusionalisasi kerjasama pertahanan. Sejak tahun 2007-2008, pihak Indonesia sudah mengajukan suatu draft *Defense Cooperation Agreement* pada Australia.<sup>47</sup> Hingga saat ini belum nampak finalisasi perjanjian kerjasama pertahanan antara kedua negara tersebut. Beberapa tahun belakangan ini kerjasama pertahanan kedua negara berlangsung dengan baik dan makin intensif. Ini bisa dilihat dari hubungan antara pimpinan militer kedua negara yang akrab dan saling berkunjung yang cukup sering antara kedua belah pihak.<sup>48</sup> Peningkatan kerjasama kedua negara dapat dilihat pula dari anggaran yang dialokasikan pemerintah Australia dalam *Defense Cooperation Program* (DCP) dengan militer Indonesia, Lihat tabel 2 dibawah. Angka dalam tabel ini menunjukkan kenaikan anggaran dari tahun ke tahun kecuali periode tahun 2002/03 dan 2006/07.<sup>49</sup>

**Tabel 2. Jumlah Anggaran DCP untuk Indonesia<sup>50</sup>**

<b>Tahun</b> <b>Keterangan</b>	<b>2001/02</b>	<b>2002/03</b>	<b>2003/04</b>	<b>2004/05</b>	<b>2005/06</b>	<b>2006/07</b>
Anggaran Kerjasama militer (dalam Australian \$ dan hitungan '000).	5,131	4,583	5,048	6,060	6,130	5,426

Dalam konteks keamanan kawasan, kerjasama pertahanan kedua negara menurut Richard Brabin-Smith, peneliti senior Australian National University (ANU), lebih merupakan keberlanjutan dari kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya, serta turut menyumbang pada keamanan kawasan. Berikut penjelasan dari Richard, prinsip dasar kerjasama kedua negara pada periode 2000-2007 memiliki kesamaan kepentingan yaitu, pertama untuk mendorong saling pemahaman antara militer kedua negara dalam hal kebiasaan dan perspektif masing-masing yang dapat mengurangi kesalahpahaman; kedua, untuk mendukung peningkatan kapasitas bagi ketahanan kawasan; ketiga, untuk memperkuat kapasitas dalam keamanan maritim; keempat, membangun kapasitas dalam kerjasama kontra terorisme.<sup>51</sup>

## II. Faktor-faktor pendorong kerjasama Pertahanan Australia-Indonesia

Kerjasama bilateral Australia Indonesia merupakan bagian dari kebijakan Australia dalam tujuannya menjaga keamanan di kawasan Asia Pasifik. Ikrar Nusa Bhakti menyatakan upaya Australia menjaga kawasan ini agar aman dan stabil adalah untuk membantu diri sendiri dari berbagai ancaman.

47 Lihat laporan yang tidak dipublikasi, Kerjasama Bidang Pertahanan, Kemhan, Jakarta; 2010. Hal. 11.

48 Lihat laporan Annual Defense report Australia, dari tahun 2003 hingga 2007. Lihat juga Sekilas Hasil Dialog IADSD. 2009.

49 Tahun 2002/03, Australia mengakui lebih fokus pada bantuan militer dalam pasukan koalisi AS yang melakukan invasi ke Irak.

50 Dirangkum dari laporan Australian Annual Defense Report dari tahun 2001 hingga 2007.

51 Wawancara tertulis dengan Richard Brabin-Smith, Mei 2011. Email pertanggal 6 Mei 2011. Lihat lampiran.



Ancaman dalam lingkup regional dan global seperti terorisme transnasional, weapon of mass destruction (WMD) dan imigran gelap adalah isu dalam lingkungan strategis yang kemudian menjadi sasaran kebijakan luar negeri Australia khususnya dalam normalisasi kerjasama dengan Indonesia.

Bagi Australia, kelompok teroris seperti Al Qaeda dan lain-lainnya mengancam kepentingan Australia. Australia telah menjadi sasaran kelompok Al Qaeda baik sebelum peristiwa 9/11 ataupun sesudahnya. Berdasarkan rekaman elektronik pernyataan pimpinan Al Qaeda, tak kurang dari enam kali negara Australia disebut sebagai sasarannya.<sup>52</sup> Contohnya tahun 2001, Osama bin Laden pernah menyatakan sebagai berikut, "The crusader Australian forces were on the Indonesia shores....they landed to separate East Timor which is part of Islamic World." Kemudian dalam sebuah rekaman video, bulan Mei 2002, Osama bin Laden mengatakan, Apa hubungan Australia, yang terletak jauh diselatan bumi, dengan pendudukan yang terjadi di Afghanistan dan Palestina? Pernyataan-pernyataan Al Qaeda ini, menurut Australia sudah merupakan ancaman nyata baginya.

Mengapa Australia menganggap ancaman Al Qaeda ini sebagai hal penting, karena Australia memiliki kepentingan global. Dalam Buku Putih Terorisme 2004, dinyatakan warga negara Australia yang berada di luar negeri berjumlah 720.000 orang dan setiap tahun ada 120.000 orang Australia bepergian keluar negeri dalam rangka dinas dan pekerjaan. Selain itu, dari aspek ekonomi dinyatakan satu dari lima orang Australia bergantung pada ekspor jasa dan barang milik Australia atau dalam angka yakni ekspornya bernilai 140 juta \$ Australia pertahun. Pada tahun 2003 saja, jumlah investasi ekonomi Australia di luar negeri berjumlah 154 juta \$ Australia dan sebaliknya negara Australia menerima investasi asing senilai 233 juta \$ Australia.<sup>53</sup>

Dengan kenyataan ini Australia berkepentingan untuk menjaga keamanan orang dan aset ekonomi dari ancaman teroris. Ancaman ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Australia dan dunia internasional, karena membuat biaya perjalanan dan perdagangan menjadi tinggi, serta tentunya melemahkan pandangan investor dan konsumen pada ekonomi dunia.<sup>54</sup>

Sehingga masuk akal mengapa Australia terlibat secara aktif pada kampanye perang di Afghanistan dan Irak. Australia mengirimkan beberapa kapal perang dan juga pasukan *expeditionary* di kedua front itu. Posisi Australia terhadap AS sangat tegas yakni AS adalah pilar utama bagi keamanan Australia dalam menghadapi terorisme, karena AS memiliki bantuan sumber daya dan komitmen yang jelas terkait keamanan Australia.

Terkait dengan Irak, yang dituduh AS sebagai negara yang sedang memproduksi senjata pemusnah massal (WMD). Australia menganggap serangan ke Irak ini adalah bagian dari tanggungjawab Australia sebagai negara sekutu AS dan tidak mungkin menghindar dari tanggungjawab ini. Walaupun di dalam negeri Howard mendapat kecaman soal agresi ke Irak yang dipimpin AS. Alasan utama Howard agar Australia terlibat perang di Irak adalah sebagai berikut, perlucutan senjata (WMD) di Irak sangat perlu bagi keamanan dunia dan merupakan bagian dari kepentingan nasional Australia dalam jangka panjang.<sup>55</sup> Walaupun untuk perubahan struktur pemerintahan di Irak ada perbedaan dengan AS, namun Australia tetap mendukung agresi sekutu ke Irak dan itu dilakukannya tanpa ragu-ragu sesuai dengan praktek kepentingan strategis Australia pada AS.<sup>56</sup>

47 Lihat laporan yang tidak dipublikasi, Kerjasama Bidang Pertahanan, Kemhan, Jakarta; 2010. Hal. 11.

48 Lihat laporan Annual Defense report Australia, dari tahun 2003 hingga 2007. Lihat juga Sekilas Hasil Dialog IADSD. 2009.

49 Tahun 2002/03, Australia mengakui lebih fokus pada bantuan militer dalam pasukan koalisi AS yang melakukan invasi ke Irak.

50 Dirangkum dari laporan Australian Annual Defense Report dari tahun 2001 hingga 2007.

51 Wawancara tertulis dengan Richard Brabin-Smith, Mei 2011. Email pertanggal 6 Mei 2011. Lihat lampiran.

52 Ibid. Hal. 66.

53 Transnational Terrorism, Op.cit. Hal. 69.

54 Ibid, Hal. 69.

55 Paul Kelly, Op.cit. Hal 54.

56 Ibid. Hal. 55

Australia terlibat aktif dalam pengaturan keamanan yang bertujuan menghentikan penyelundupan senjata pemusnah massal (WMD) yaitu *Proliferation Security Initiative* (PSI) yang digagas AS pada tahun 2003. PSI merupakan *security arrangement* gagasan Amerika Serikat dalam mencegah perdagangan ilegal senjata pemusnah massal dengan penggunaan instrumen militer dalam interdikasi kapal yang dicurigai membawa elemen WMD. Australia ikut berpartisipasi dalam latihan *Pacific Protector I*, tahun 2003, bersama AS, Jepang dan Perancis di Coral Sea<sup>57</sup>. Latihan Pacific Coral I dalam konteks PSI adalah melakukan latihan interdiksi terhadap kapal yang dicurigai membawa muatan senjata pemusnah massal. Kemudian pada tahun 2006, Australia menjadi tuan rumah dalam latihan *Pacific Protector II* yang dilakukan di Darwin dengan tekanan pada latihan intersepsi udara dan manuver di darat.<sup>58</sup> Keterlibatan Australia disini memperlihatkan isu WMD yang berkaitan dengan rejim Korea Utara adalah prioritas utama dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan Australia.<sup>59</sup> Selain itu, Australia dengan negara-negara sekutu dan mitranya di kawasan Asia Pasifik sangat khawatir atas kemampuan misil balistik yang dimiliki rejim Korea Utara. Misil balistik dan senjata pemusnah massal ini menjadi kombinasi yang sangat berbahaya bagi keamanan internasional khususnya bagi kawasan Asia Timur.

Kondisi keamanan internasional pasca serangan 9/11 mendorong timbulnya berbagai persoalan lainnya di kawasan Asia Pasifik. Salah satu konsekuensi dari konflik global tersebut yaitu sekelompok warga meninggalkan negaranya sebagai pengungsi dan imigran gelap. Selain itu terdapat pula alasan-alasan ekonomi yang berasal dari imigran ataupun dari kelompok penyelundup. Selain itu, persoalan konflik internal di sejumlah negara di Asia juga menjadi pemicu arus imigran gelap dan pengungsi. Dengan globalisasi, arus imigran gelap sangat mendominasi persoalan lintas batas negara dan memiliki dampak yang besar. Secara statistik, jumlah uang yang diterima oleh kelompok penyelundup bisa mencapai 20 juta \$AS.<sup>60</sup>

Pada umumnya, motivasi yang mendorong mereka melakukan imigrasi secara ilegal adalah adanya permasalahan krusial yang mereka hadapi di negara asalnya, yang bisa dilihat dari aspek politik, keamanan, ekonomi, maupun alasan individual.<sup>61</sup> Tanpa persoalan ini tidak mungkin mereka melakukan kegiatan yang sangat berisiko, yang membutuhkan biaya ekonomi yang tinggi dan resiko kehilangan nyawa dalam perjalanan terutama di laut lepas. Tentunya arus perpindahan imigran gelap dari suatu negara ke negara lain khususnya ke Australia menjadi isu nasional dan juga internasional. Kotak dibawah ini menjelaskan kenapa pengungsi melakukan perjalanan jauh menuju Australia.

#### **Kotak 1.**

##### **Faktor ekonomi dan politik dalam kasus Pengungsi dan Imigran gelap ke Australia**

Sejumlah negara seperti Myanmar, Bangladesh, Srilanka, Afghanistan, Pakistan, dan Irak, merupakan negara asal para imigran gelap, menghadapi kemiskinan dan keterpurukan ekonomi yang hebat, akibat pemerintahan yang otoriter, sistem politik yang korup ataupun konflik politik dan perang saudara yang berkepanjangan. Ketidakstabilan politik dalam negeri dan perang yang lama telah membawa dampak sangat buruk pada perekonomian masing-masing negara. Stagnasi ekonomi, tidak adanya peluang usaha, tidak tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pengangguran, serta merosot dan buruknya kesejahteraan dan kualitas kehidupan penduduk mendorong mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Ketidakmampuan mereka membiayai perjalanan dan persyaratan yang tidak terpenuhi untuk dapat memasuki negara lain secara sah membuat mereka terdampar sebagai imigran ilegal. Mereka yang memiliki ekonomi yang lebih dimotivasi oleh kepentingan pragmatis mencari peluang ekonomi yang menyediakan berbagai masa depan yang lebih baik di negara lain (Australia). Kelompok yang pertama didominasi oleh para imigran gelap asal Myanmar, Bangladesh, dan Srilanka, sementara kelompok yang kedua didominasi oleh mereka yang berasal Afghanistan, Pakistan, Irak, dan Iran.

57 William Tow (eds.), *The US, Australia and Japan: New Security Triangle*. London; Routledge, 2007, hal. 15.

58 *Ibid.*, hal 15.

59 *Ibid.*, hal. 25.

60 *Transnational Threat*, Op.cit. Hal 18.

61 Poltak P. Naingolan, *Masalah Penyelundupan dan Pengungsi*, Jakarta; P3DI. 2009. Hal. 20.

Bagi Australia dampak ekonomi dari arus imigran gelap dan pengungsian sangat besar. Sumber daya negara baik secara finansial dan tenaga<sup>63</sup> – yang dilakukan institusi imigrasi, kepolisian Australia dan ADF - terkuras untuk mengurus masalah ini. Australia yakin negaranya tidak mungkin mampu mengatasi sendiri persoalan ini, maka upaya komprehensif dan bersama dengan organisasi dunia serta negara-negara lain harus dilakukan. Indonesia adalah negara terdekat yang menjadi lintasan arus pengungsi dan imigran gelap ini, konsekuensinya Australia memerlukan kerjasama dari pemerintah Indonesia dibantu oleh sejumlah organisasi internasional.

Australia sangat berkepentingan untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia terutama bagaimana mengatasi gangguan keamanan maritim di perbatasan kedua negara. Pengamat politik dari Australia Prof. Jamie MacKie secara tepat mendeskripsikan kepentingan Australia dengan Indonesia, salah satunya berdasarkan argumen ini, “*Preserving the integrity of our maritime boundaries with Indonesia and maintaining Jakarta's cooperation in handling the problems that arise from our shared contiguity around the Timor and Arafura Seas, such as quarantine, control of smuggling and drug trafficking, illegal immigration and fisheries are clearly matters of high priority for Australia. It could become highly troublesome for us if we found ourselves at cross purposes with Indonesia on any aspect of these issues.*”<sup>64</sup>

Dapat dilihat bahwa dari aspek lingkungan strategis regional dan global Australia menghadapi berbagai isu yang disebut sebagai ancaman nontradisional. Sedikitnya dua isu utama yakni terorisme dan keamanan maritim (red; imigran gelap, penyelundupan, dll.) yang mengancam kepentingan strategis Australia secara faktual. Dua isu strategis ini menjadi pertimbangan utama bagi Australia dalam melakukan normalisasi hubungan pertahanan dengan Indonesia.<sup>65</sup> Kalau pada dekade sebelumnya, pembajakan pesawat menjadi bahasan kedua belah pihak, namun kali ini melawan terorisme jihad merupakan prioritasnya.

Kebijakan Australia ini merupakan *'whole of government effort'* dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang sudah berubah. Upaya komprehensif dari Australia bisa dilihat dari sejumlah implementasi kerjasama yaitu patroli bersama, latihan bersama dan pendidikan yang dilakukan setiap tahun di Australia maupun di Indonesia.<sup>66</sup>

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Australia 2000, ada lima kepentingan strategis Australia; *pertama*, memastikan pertahanan Australia dan lingkungan dekatnya dari ancaman agresi pihak asing; *kedua*, mendukung keamanan dari negara tetangga terdekat; *ketiga*, mendorong kerjasama dan stabilitas di negara-negara Asia Tenggara; *keempat*, mendukung stabilitas strategis bagi wilayah Asia Pasifik; *kelima*, mendukung keamanan global. Semua ini terkait kepentingan nasional Australia sebagai aktor di kawasan. Keamanan bangsa dan negaranya merupakan prioritas utama kebijakan luar negeri Australia yang diimplementasikan dengan kerjasama dengan negara-negara tetangga terutama Indonesia sebagai tetangga terdekat.

Melihat dari aspek geografis Indonesia dan Australia menghadapi persoalan yang sama di kawasan ini yaitu persoalan ketidaksabilan dan ancaman keamanan. Kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam menghadapi persoalan keamanan maritim, terorisme dan ancaman nontradisional lainnya. Sesuai dengan asumsi awal dari penelitian ini, maka kepentingan nasional

62 Dikutip dari Buku Masalah Penyelundupan dan Pengungsi, Poltak P. Naingolan (ed.), Jakarta; P3DI. 2009. Hal. 20-21.

63 Transnational Threat, Op.cit. Hal. 18.

64 Jamie MacKie, Australia-Indonesia: Current Problems and future Prospect. Sydney; Lowy Institute, 2007. Hal. 23.

65 Wawancara dengan Richard Brabin-Smith, peneliti ANU, Mei 2011. Email 6 Mei 2011.

66 Sebagai contoh tahun 2009, Australia menawarkan 100 kursi bagi perwira TNI untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Australia. Lihat Sekilas Hasil Dialog IADSD, 2009. Hal. 16.

Australia menjadi faktor penggerak dari kebijakan luar negeri Australia. Kepentingan nasional Australia dalam Buku Putih Luar Negeri 2003 terdiri dari keamanan dan kesejahteraan. Menurut pandangan Australia, Indonesia sebagai negara tetangga terdekat memiliki posisi yang penting,<sup>67</sup> sehingga kerjasama pertahanan dalam kerangka kerjasama keamanan lebih luas merupakan pilihan realistis bagi Australia.<sup>68</sup>

Seperti telah diuraikan dalam tulisan di atas pada tahun 2006, kedua negara telah menandatangani *Framework of Security Cooperation* (FSC) di Lombok. FSC adalah puncak dari normalisasi hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia dari aspek politik dan keamanan. FSC menjadi landasan hukum bagi suatu kerjasama keamanan lebih luas (*broadened security issue*). Penandatanganan ini diartikan ada kepentingan keamanan yang sama diantara kedua negara melihat isu dan tantangan strategis saat ini.

Sehingga dapat dikatakan FSC adalah kerangka kerjasama keamanan yang komprehensif dan lebih ditujukan pada ancaman keamanan nontradisional. Bagi Australia FSC menjadi penting karena dapat mengikat kedua negara dalam suatu kerja yang lebih konkret, operasional dan berlanjut. PM John Howard pada saat itu menyatakan FSC adalah suatu landasan yang lebih kuat dalam melakukan dialog intensif, pertukaran pengetahuan dan pelaksanaan aktivitas kerjasama (*cooperative activities*) diantara kedua negara. Menurut Departemen Pertahanan Australia upaya peningkatan keamanan kawasan dan dunia telah dicapai melalui kesepakatan FSC ini.

Isi FSC hampir seirama dengan hasil dialog pertahanan strategis kedua negara atau IADSD yang telah dilakukan sejak tahun 2001 hingga saat ini. Ada lima kluster tematik yang menjadi fokus kerjasama pertahanan kedua negara yang terangkum dari hasil dialog, yakni; pertama, bidang kontra terorisme dan kerjasama intelijen; kedua, keamanan maritim; ketiga, penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan; keempat, kerjasama di bidang operasi perdamaian; dan kelima, pendidikan, pelatihan dan tata kelola. Dari kelima kluster ini hampir semuanya merupakan isu non-tradisional atau terkait aktivitas operasi militer selain perang.<sup>69</sup>

Dalam dialog ini terlihat bahwa pihak Australia lebih sering berinisiatif melakukan penawaran pada pihak Indonesia untuk terlibat kembali dalam suatu program baik itu latihan bersama, patroli bersama, seminar/konferensi maupun pendidikan dan pelatihan (kursus singkat, kursus lanjutan perwira dan program master).<sup>70</sup> Dilain pihak Departemen Pertahanan RI sepakat kerjasama ini dalam rangka untuk membangun kapasitas personel TNI. Pada tahun 2007 saja, sedikitnya sudah ada 41 rencana program kerjasama diantara insitusi pertahanan kedua negara.<sup>71</sup> Ini menunjukkan ada kemajuan yang signifikan dalam kerjasama kedua negara pasca insiden Timor Timur 1999.

Secara singkat, langkah-langkah operasional dalam Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap normalisasi kerjasama pertahanan dengan Indonesia sangat terlihat secara kuantitatif dari data *Defense Cooperation Program* (DCP) yang dikeluarkan Dephan Australia. Data yang disebutkan itu menunjukkan ada peningkatan anggaran kerjasama kedua negara. Data ini cukup memperkuat beberapa argumen yang disampaikan oleh beberapa pejabat Dephan Australia terutama dari level tertinggi yaitu menteri hingga pejabat eselon 1 dan 2 Dephan Australia bahwa kerjasama dengan Indonesia merupakan bagian dari kepentingan Australia yaitu menjaga keamanan nasional, regional dan dunia.

---

67 Lebih dari 50 persen perdagangan Australia harus melewati kawasan maritim Indonesia. Ini berarti gangguan keamanan di kawasan ini bisa mengganggu kesejahteraan warga Australia. Lihat pidato Menhan Australia Joel Fitzgibbon, di Lemhannas, 18 September 2008.

68 Allan Gyngell, *Australia Indonesia*, dalam Brendan Taylor (ed), *Australia as Regional Power: Friendship in flux*. Sydney, Routledge, (2007).

69 Lihat Hasil Dialog Indonesia Australia IADSD, Desember 2009. Hal. 14.

70 Ibid. Hal 12.

71 Ibid, Hal. 13.

## Daftar Pustaka

### **Buku dan Jurnal**

- Abbas, Nasir, *Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2009.
- Acharya, Amitav dan Arabinda Acharya, "The Myth of Second Front, Localizing the War on terror in South-east Asia," *The Washington Quarterly*, Autumn, 2007.
- Bartholomees, John (ed), *Guide to National Security Policy and Strategy*; US Army War College, Carlisle, 2004.
- Butt, Kennt Hughes and Jeffrey Reynold. *The struggle against Extremist Ideology: addressing the Conditions that Foster Terrorism*, CSL, Army War College, 2005.
- Bhakti, Ikrar Nusa, *Merajut Jaring jaring Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia; suatu Upaya Menstabilkan Hubungan Bilateral Kedua Negara*, LIPI, Jakarta, 2006.
- Bolton, David, *Defense 2000; Southeast Asia Perspectives*, Canberra; Geddes Publication, 2003.
- Conboy, Ken, *Intel I*, Pustaka Primatama, Jakarta; 2005
- , *Intel II*, Pustaka Primatama, Jakarta; 2007.
- Evans, Gareth and Bruce Grant, *Australian Foreign Relations*, 3rd edition, Melbourne University Press, Melbourne, 1993.
- Gyngell, Allan dan Michael Wesley, *Making Australian Foreign Policy*, 3rd edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
- Holsti, Kalevi. J, *Kerangka Analisa Politik Internasional* (terjemahan), Binacipta, Bandung, 1987.
- Howard, Jennifer, "To Deter and Deny: Australia Interdiction to Asylum Seekers", *Journal Refuge*, No. 4. Vol. 21. 2003.
- Irawan, Prasetya, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Admnsitrasi, FISIP UI, 2007.
- Ismail, Noor Huda, *Temanku Teroris*, Hikmah, Jakarta, 2011.
- Kelly, Paul, *Howard's Decade: an Australian Foreign Policy Reappraisal*, Lowy Institute, Sydney, 2006. Taylor, Brendan (ed), *Australia as Asia Pacific Regional Power: Friendship in flux*, Routledge, Oxford, 2007.
- Lentner, Howard, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, Charles and Meryll Publ. Co. Columbus, 1974.
- MacKie, Jamie, *Australia - Indonesia: Current Problem, Future Prospects*, Lowy Institute, Sydney; 2007.
- Masoed, Mochtar, *Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Pusat Antar Universitas, UGM, 1990.
- Nainggolan, Poltak P, *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia*, P3DI, Jakarta, 2009.
- Rosenau, James, *The Scientific study of Foreign Policy*. Nichols Publishing; New York, 1980.
- Singh, Bilveer, *Defense Relations between Australia and Indonesia in Post Cold War Era*", Greenwood, CT, 2002,
- Soesastro, Hadi and Tim McDonalds (eds), *Indonesia and Australia Relations; Diverse Interests and Converging issues*. CSIS, Jakarta, 1995.
- Storey, Ian, "Securing Southeast Asia Sea Lane's: A Work in Progress", *Asia Policy*, August, 2008.
- Sukadis, Beni (ed), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2009*, Lesperssi, Jakarta; 2009.
- Tow, William (eds.), *The US, Australia and Japan: New Security Triangle*. Routledge, London, 2007.

Viotti, Paul and Mark Kauppi, *International Relations Theory: Realism Pluralism and Globalism*, Macmillan Publishing Co., New York, 1993.

### **Laporan Penelitian dan Dokumen Resmi**

Annual Defense Report 2001/2, Department of Defense, Canberra; CoA, 2002

Annual Defense Report 2002/3, Department of Defense, Canberra; CoA, 2003

Annual Defense Report 2003/4, Department of Defense, Canberra; CoA, 2004

Annual Defense Report 2004/5, Department of Defense, Canberra; CoA, 2005

Annual Defense Report 2005/6, Department of Defense, Canberra; CoA, 2006.

Annual Defense Report 2006/7, Department of Defense, Canberra; CoA, 2007.

Australian Department of Foreign Affairs and Trade, "Advancing National Interest" *Australian Foreign Affairs White paper*, Australian Government Publishing, Canberra, 2003.

Australian Defense White Paper 2000: Our Future Defense Force. Commonwealth of Australia; Canberra, 2000.

Buku Himpunan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertahanan, Setjen Biro Hukum, Jakarta; 2007.

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003: Memasuki Abad 21, Departemen Pertahanan, Jakarta; 2003.

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Departemen Pertahanan, Jakarta, 2008.

Counterterrorism White Paper: Securing Australia, Protecting Our Community. Canberra; CoA. 2010.

Defense Update 2003, Commonwealth of Australia; Canberra, 2003.

Defense update 2005, Commonwealth of Australia; Canberra, 2005.

Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defense and Trade on Indonesia and Australia Bilateral relations. Mei 2003

Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defense and Trade on Indonesia and Australia Bilateral relations. Juni 2003

Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defense and Trade on Indonesia and Australia Bilateral relations. 2005

Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade; Defense Subcommittee, Canberra, CoA. 2003.

Laporan Penelitian, Persepsi TNI dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia – Australia, Lesperssi, Jakarta. 2010.

Sekilas Hasil-hasil Dialog Strategis Pertahanan Indonesia Australia (IADSD), Departemen Pertahanan, Jakarta; 2009.

The 9/11: Commission Report, WW. Norton, New York. USA. 2004.

Transnational Terrorism: The Threat To Australia. Commonwealth of Australia; Canberra, 2004.

### **Media Massa dan Internet**

Balibo, Simbol Kelam di Hari Pers, diakses <http://m.politikana.com/baca/2009/07/25/balibo-tragedi-jurnalists.tanggal21Mei2011>.

Alexander Downer speech, Security through Cooperation, Canberra, 2 Mei 1996; diakses dari <http://www.foreignminister.gov.au/speeches/1996/regsec5.html>

Australia Quietly Resume Military Aid to Indonesia, by Pip Hinman, Green left Weekly, Sydney; 2 Agustus 2000. Diakses dari <http://etan.org/et2000c/august/1-5/02aust.htm>

### **Wawancara**

Richard Brabin-Smith

Greta Nabbs

Paul Iozzi.